



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN
(Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)**

**Magdalena Lenama
Universitas Wijaya Putra Surabaya**

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

*Dikirim : 01 Desember 2021
Revisi pertama : 05 Desember 2021
Diterima : 06 Desember 2021
Tersedia online : 10 Desember 2021*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Para Pihak, Pinjaman Online

Email : magdalenalenama@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi berbicara dalam mengomentari persoalan faktual pada siswa kelas I SDN Pagerngumbuk II Kecamatan Wonoayu melalui model titok.

Penelitian ini dilaksanakan di dalam kelas I SDN Pagerngumbuk II Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui 2 siklus. Siklus I dilaksanakan tanggal 12 Februari 2015 dan 19 Februari 2015 pukul 07.00-08.10 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia materi mengomentari persoalan faktual disertai alasan yang mendukung dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbicara. Sementara siklus II dilaksanakan tanggal, 8 Maret 2015 dan 15 Maret 2015.

Hasil penilaian menunjukkan peningkatan dari Siklus I sampai siklus II sebesar 19 % dan siswa yang tidak tuntas hanya 2 siswa (8%). Itu sudah melampaui Indikator keberhasilan KKM 70, dan ketuntasan Klasikal 80%. Hasil pengamatan juga menunjukkan ada peningkatan dari kategori baik di siklus I menjadi sangat naik pada siklus II. Sedang rata-rata prosentase hasil angket pernyataan siswa tentang pembelajaran model Titok untuk jawaban "Ya" juga mengalami peningkatan 25% di siklus II. Hasil pengamatan skor 3 kategori baik. Peningkatan Prestasi berbicara dalam menomentari persoalan faktual dilihat dari jawaban "Ya" pada angket pernyataan siswa > 75 %.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab. Di Indonesia landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah Undang-Undang nomor. 6 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah dalam negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan desa, PP no.47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa, perubahan atas PP nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan kemendesa nomor. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang berbunyi: desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Agar tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran salah satunya sangat tergantung dari proses penataan ruang desa itu sendiri. Salah satu bagian dari proses tersebut dibentuk oleh pemenuhan dan berjalannya kewajiban dan hak warga sebagai pelaku pembangunan itu sendiri.

Hak warga dalam penataan ruang desa antara lain hak sebagai warga Negara yang mendapatkan ruang untuk hidup berkeluarga, mendapatkan dan mengembangkan ide, karya, ataupun bersosialisasi. Dalam program partisipasi hak masyarakat adalah mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pemetaan kondisi masyarakat, potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dan masyarakat itu sendiri secara bersama-sama dengan pihak lain untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang dituju. Mewadahi hak masyarakat tersebut menjadi proses yang penting untuk menimbulkan rasa memiliki atas perencanaan dan program yang dihasilkan. Untuk itu semua pihak berkewajiban mentaati dan melaksanakan rencana pembangunan ini dengan sungguh-sungguh.

Penyertaan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari identifikasi masalah, prioritas, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila desa akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalisasi.

Menurut Nurkatamso, Agus (2013), masyarakat lokal dengan pengetahuan dan pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Puspansih, Niken Septihandini (2013), masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah

kebijakan pembangunan yang dikehendaki, Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu atau golongan. Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka sehingga mereka berdaya.

Menurut Chaerunisa, Chika (2014), Proses perencanaan pembangunan partisipasi adalah proses perencanaan pembangunan yang mendasari pada ketentuan masyarakat setempat serta didukung peran serta aktif masyarakat dari awal pengidentifikasian masalah sehingga tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan akan tepat sasaran, tepat waktu, berdaya guna dan berhasil guna apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya peran aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. Agustin, Merry. 2016. Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau *working plan* sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) kegiatan (proses); (3) out put dan outcomes. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintah yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan program pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ardianto, E. (2011) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan mempunyai sifat sangat penting:

1. Masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Menurut Agustinus (2011) Partisipasi masyarakat merupakan model pendekatan *bottom up*, yang tak lain adanya pemberdayaan masyarakat dimana dalam hal ini peran pemerintah hanya sebatas memberikan fasilitas saja tanpa ikut campur kaitan dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini akan memberikan semangat baru terkait dengan pengembangan masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipatif, mengingat beberapa manfaat dalam program berupa: efisien, efektif, menjalin kemitraan, memberdayakan kapasitas, memperluas ruang lingkup, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, keberlanjutan, pemberdayaan kelompok marjinal dan meningkatkan akuntabilitas. Meskipun disadari

dengan pendekatan ini, membutuhkan biaya yang besar dan lambatnya proses pengambilan keputusan.

Sementara masalah partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan belum maksimal. Untuk itu peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya sangat diperlukan. Andreeyan, Rizal (2014) Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbang input maupun dalam hasilnya, dan perlu diingat bahwa sekitar 80% masyarakat Indonesia hidup di pedesaan yang jauh dari pusat administrasi pembangunan. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa masa lampau, bahkan sampai sekarang, masih banyak rakyat yang belum tersentuh oleh kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk menikmati hasil pembangunan, (Zainuddin Ali, 2009).

Menurut Nugroho (2015) Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna mendukung keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan. Pengaruh para tokoh masyarakat di Desa masih sangat kuat dan kental bahkan masih seringkali menjadi panutan dalam segala hal kegiatan sehari-hari warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya.

Nugroho (2015) Usaha untuk mengubah kebiasaan merupakan pekerjaan yang susah, hal tersebut telah dirasakan pengurus RT akan memulai melibatkan masyarakat yang terbiasa dengan hanya menunggu perintah, namun kurang disertai sikap kritis yang kurang tahu kearah mana aspirasi mereka akan dibawa dan hal ini berlangsung dari dahulu sampai sekarang, bahwa banyak sekali program dalam rangka mencapai tujuan membangun manusia, namun karena kebutuhan manusia begitu banyak aspeknya, sering kali menjadi tumpang tindih dan belum bisa berhasil secara maksimal bahkan terkadang kurang tepat sasaran karena keterbatasan waktu yang sudah ditentukan, maka dibutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan proses yang terus menerus, dan tentu saja dalam kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan fungsi pengurus RT, PKK, Dasa wisma, kelompok pengajian sebagai petugas pembangunan dalam program pembangunan sangat diharapkan.

Masih kuatnya dominasi tokoh masyarakat di tingkat Desa dalam melakukan program pembangunan membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang maksimal. Hal ini dapat menyebabkan perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Surotinojo Ibrahim (2009) Proses program pembangunan masyarakat ditingkat Desa, dalam proses pengambilan keputusan yang sangat mempengaruhi tingkat perekonomian dan kehidupan masyarakat desa akan tetapi hanya perwakilan tokoh masyarakat saja yang dilibatkan yang terkadang tidak mengakomodir aspirasi masyarakat bawah.

Hal inilah yang mendorong penulis memilih lokasi Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sebagai studi kasus untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan Desa.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”.

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa permasalahan pokok yang dapat dirumuskan dan akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan mendeskripsikan partisipatif masyarakat dalam program pembangunan di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”.
2. Untuk Mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Partisipasi

Menurut A. D. Siti Irene (2011), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian “*a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them*” (Naryan, 2010), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Aswasulasikin. (2009) di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa

pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2009: 2) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Pengertian Perencanaan

Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses menyiapkan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian tertentu. Dengan definisi tersebut, maka perencanaan mempunyai unsur-unsur: (1) Berhubungan dengan hari depan, (2) Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan (3) Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. (Kunarjo, 2009:14). berpendapat bahwa:

“Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan Soetomo. (2012) berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Beliau juga mengatakan bahwa perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Pengertian Pembangunan

Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar social. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan social budaya.

Sondang P.Siagian dalam Admisitrasi Pembangunan (2009) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Pandangan Coralie Bryant dan Louise White dalam *Managing Development in the Third World* (2010, 14) yang dikutip oleh Ndraha (2014, 15;16) mengatakan bahwa pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya.

Perencanaan Pembangunan

Pola perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan berbagai Negara berkembang yang lebih dikenal dengan *top-down strategy* sebagaimana dikemukakan

oleh Ndraha (2014:127) pada awal proses pembangunan memang pola ini membawa manfaat, tetapi takkala pola itu mengacu pada system, timbullah masalah. Masyarakat terbiasa untuk bergantung pada pemerintah dan kemampuannya untuk berkembang secara mandiri sukar dikembangkan. Mekanisme *bottom-up strategy* memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ndraha.

1. Melalui mekanisme bawah ke atas, masyarakat dapat member tanggapan, jawaban atau feedback kenapa pemerintah tentang kesesuaian antara aspirasi masyarakat dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.
2. Melalui mekanisme tersebut masyarakat dapat mengemukakan dan menyalurkan aspirasi, permintaan dan tuntutannya kepada pemerintah.
3. Melalui mekanisme tersebut dapat terjadi tawar menawar, pemufakatan atau kompromi antara masyarakat dengan pemerintah.
4. Dapat dilakukan konsumsi timbal-balik antara informasi yang dapat mengenai berbagai hal
5. Dapat terjadi proses “exchange” antara masyarakat dengan pemerintah atau kandidat politik misalnya bagi kaum miskin untuk memberikan suaranya dengan harapan akan menerima keuntungan tertentu dari pemerintah.

Tetapi mekanisme *bottom up* saja tidak cukup untuk membantu tercapainya efektivitas perencanaan pembangunan, karena dalam pengambilan keputusan, sering kali masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar, karena dominasi pemerintah yang begitu kuat. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat turut mengambil keputusan atas hal-hal yang menyangkut perbaikan taraf hidup anggota- anggotanya, maka lembaga-lembaga yang berpartisipasi dalam program pemerintah harus memiliki kekuasaan yang nyata, artinya lembaga-lembaga tersebut memiliki keberdayaan.

Pengertian Musrenbang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. (*Sumber : Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Ciri utama studi kepustakaan menurut Sugiyono. 2017.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Zed (2008) adalah fokus penelitian atau pokok asal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah (1). Dampak partisipasi pada hasil program pembangunan. (2). Faktor yang mempengaruhi partisipasi. Dengan dimensi teori – teori model implementasi kebijakan publik oleh beberapa ilmuwan yang sudah peneliti kelompokkan dan rangkum bahwa pada setiap model mengemukakan implementasi di pengaruhi oleh hal berikut : Sumber daya, Ukuran dan Tujuan, Komunikasi, serta Sikap Pelaksana

Apabila pada proses perencanaan terutama pada proses pelaksanaan musrenbang telah memenuhi ketiga aspek tersebut, berarti pemerintah telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah dengan model *bottom up*. Sebaliknya apabila dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa tidak memenuhi tiga aspek dalam pendekatan perencanaan yang berbasis partisipasi tersebut diatas maka pemerintah tidak melaksanakan proses penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat dan masyarakat hanya dijadikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan serta lembaga perencanaan pembangunan hanya melaksanakan proses seremonial perencanaan pembangunan tanpa melihat substansi perencanaan pembangunan itu sendiri.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur - literatur relevan seperti buku, skripsi dan jurnal, serta media internet yang meliputi, Tesis, Skripsi, Jurnal yang berisi informasi yang mendukung penulisan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:37), diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat. Adapun sumber – sumber tersebut secara rinci, meliputi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini akan selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahkan. pengumpulan data tak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal - hal atau variabel yang berupa catatan, buku, tesis atau artikel, jurnal, dan sebagainya (Arikunto, 2010).

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama, analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian.

Kedua, setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa dengan kata lain partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 1) partisipasi politik Political Participation, 2) partisipasi sosial Social Participation dan 3) partisipasi warga Citizen Participation/Citizenship, ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik, political participation lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi Sosial, social Participation partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary ataupun di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
3. Partisipasi Warga, citizen participation/citizenship menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Dampak Partisipasi pada Hasil Program Pembangunan

Pertama Menurut saya Partisipasi masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan, sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan, masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam suatu program pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhannya,. Peran aktif pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan, serta masyarakat akan menentukan keberhasilan program bantuan pembangunan partisipatif. (M. Yunan Khoiron, 2003). Faktor yang mempengaruhi partisipasi pembangunan, keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Kedua Persepsi masyarakat yang baik akan mendorong tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan KKLD di Ujungnegero. Ini merupakan modal utama untuk mengajak masyarakat lebih berperan aktif dan perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan KKLD. Pemerintah hendaknya tidak hanya mendengarkan kepentingan penanam modal namun juga merangkul masyarakat untuk memberdayakan kemampuan mereka. (Dwi Hapsari 2012). Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dalam. Faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam program pembangunan, faktor internal dan eksternal yang diuji menunjukkan hanya usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan komunikasi.

Ketiga Musrembang yang sampai saat ini belum memberikan hasil bagi masyarakat. Masyarakat telah pesimis dengan perencanaan partisipatif dan menganggap bahwa perencanaan partisipatif tidak akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan desa. Penelitian ini lebih berfokus pada perencanaan partisipatif sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai partisipasi masyarakat tentang rencana pembangunan jangka menengah gampong. (Andi Sayumitra 2009). Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, seseorang dalam lingkungannya untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pelayanan.

Keempat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan pengelolaan sampah dan 6 variabel bebas yaitu umur, (1). pendidikan, (2) pekerjaan, (3) bangunan fisik, (4) lamanya menetap, (5) luas pekarangan rumah, (6) peraturan daerah, dan pemahaman dengan metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Faktor pendidikan, dan pemahaman partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, sedangkan faktor pekerjaan umum, bangunan fisik, luas dan peraturan daerah tidak memberikan pengaruh nyata. (Yunizar (2001).

Kelima Pembangunan kebersihan di kota dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, dalam. Variabel yang diteliti adalah partisipasi masyarakat dan pembangunan kebersihan dengan menggunakan uji statistik model korelasi produk moment. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pembangunan kebersihan Kota Medan. Siregar (2005), dengan faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi, pemahaman tentang faktor lingkungan dapat membantu individu dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan lingkungan bersih dan sehat untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh.

Keenam Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kelayakan ekonomi pembangunan jalan alternatif sehingga dapat

digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan wilayah. Bentuk partisipasi masyarakat dalam membangun jalan alternatif yaitu ikut menyiapkan badan jalan dan lapisan pondasi bawah. Perhatian masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan cukup besar, dapat dilihat dari berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam program tersebut, baik dalam proses perencanaan maupun proses pelaksanaan kegiatan. Handayani (2007).

Ketujuh Partisipasi Masyarakat, pembangunan prasarana lingkungan, tingkat sosial ekonomi masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan, dan metode analisis kuantitatif, untuk menganalisis pengaruh hubungan sosial ekonomi masyarakat dengan bentuk partisipasi. masyarakat telah berada pada tingkat kemitraan (*partnership*), dalam keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada tingkat *therapy*. Ada beberapa faktor yang berpengaruh adalah sebagai berikut;

- a. Ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
- b. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
- c. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi, dan control manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam pikiran dan berbuat dalam rutinitas. Sitorus (2008).

Kedelapan Partisipasi Masyarakat, pembangunan prasarana lingkungan, tingkat sosial ekonomi masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan, dan metode analisis kuantitatif, untuk menganalisis pengaruh hubungan sosial ekonomi masyarakat dengan bentuk partisipasi. bentuk partisipasi masyarakat telah berada pada tingkat kemitraan (*partnership*), sedang keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara berada pada tingkat *therapy*. Faktor yang mempengaruhi tingkat sosial ekonomi adalah sebagai berikut;

- a. Tingkat pendidikan.
- b. Jenis pekerjaan.
- c. Tingkat pendapatan.
- d. Keadaan rumah tangga.
- e. Tempat tinggal.
- f. Jabatan dalam organisasi.
- g. Aktifitas ekonomi.

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktifitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Sutami (2009).

Kesembilan Upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. bentuk partisipasi, karena tahapan partisipasi merupakan proses awal yang paling penting mengenai apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Listya (2011)

Kesepuluh Berbagai program bantuan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan sejak 1993 oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi program tersebut dikhawatirkan kurang efektif karena belum menyentuh masyarakat miskinnya secara langsung. Menunjukkan bahwa PNPM-M Perkotaan tidak efektif dalam menjangkau orang miskin di Desa karena tidak terdapat hubungan antara kemiskinan dengan tingkat partisipasi, serta tidak terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dengan tingkat keberdayaan masyarakat. Faktor-faktor Kemiskinan yang memengaruhi tingkat partisipasi

Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang tinggi akan menjadi sumber modal pembangunan bagi suatu Daerah maupun Negara. Muliani (2011).

Kesebelas Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat masuk dalam kategori peranan yang tinggi (berperan baik). Faktor yang memengaruhi Menyatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung berperan sangat tinggi/sangat berperan dan tinggi/berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Program Rehabilitasi Lahan Kritis Berbasis Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dan berperan dalam pelaksanaan dan pencapaian program pembangunan. Chandra Indrawan (2011).

Kedua belas Evaluasi Partisipasi Masyarakat pada Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Faktor yang memengaruhi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dan berperan dalam dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil program pengembangan usaha agribisnis perdesaan terdiri dari: (a) adanya ketepatan sasaran (target group) penerima dana PUAP yaitu rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani serta pelaku usaha agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan maupun musiman. (b) Peningkatan akses pembiayaan kepada anggota Gapoktan Guyub Tani, yaitu adanya kemudahan bagi penerima BLM PUAP dalam mengakses bantuan yang disalurkan pada Gapoktan. Wahyuni (2011).

Ketiga Belas Partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa. Dapat diambil kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa menghadapi kendala dengan keterbatasan pemahaman masyarakat dan keterbatasan tenaga

operasional. Perbedaan Penelitian ini dengan kajian terdahulu terlihat dari tempat penelitian dan sasaran objek yang akan diteliti dan juga beberapa perbedaan lainnya berupa: tempat penelitian, tahun penelitian, sasaran penelitian. Untuk mengetahui dan menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Desa Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Desa. (Pilawati 2012).

Keempat Belas Analisis factor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari para responden yaitu masyarakat. Desa dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan disamping itu faktor ekonomi juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah, tahun penelitian, tempat penelitian. (Erma Dayanti, 2013).

Kelima Belas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pembangunan fisik maupun non fisik telah cukup aktif. Demikian dilihat dari partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Perbedaan utamanya adalah bahwa pada penelitian tersebut pembangunan lebih banyak memberikan fokus pada tahap perencanaan. Berdasarkan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya terletak pada setting penelitian saja, yaitu waktu dan tempat penelitian, lebih dari itu, penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri dibanding penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Hendryk 2013.

Keenam Belas Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa fungsi pengerakan oleh Kepala Desa dapat dikategorikan baik, namun berdasarkan dari analisis yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang tidak terlaksana dengan baik oleh kepala desa dengan melakukan pengerakan. Dan dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh kepala desa mulai dari pembinaan dalam meningkatkan daya manusia agar lebih berorientasi aktif dalam meningkatkan pembangunan desa, M.Rais 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan terlihat bahwa masyarakat cukup tanggap dalam memahami permasalahan di desanya. meskipun pada kenyataannya dalam setiap rapat musrembang lebih didominasi tokoh masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangsih tenaga dan uang. namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memberikan partisipasinya karena sepenuhnya biaya pembangunan diserahkan kepada pihak pemerintah.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dilihat pada upaya pemeliharaan dan merawat hasil pembangunan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sebagai kesatuan yang memiliki tanggungjawab akan aset pembangunan desa.

4. Partisipasi dalam evaluasi dapat terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam menilai hasil pembangunan. pemerintah desa melalui wadah rapat evaluasi hasil pembangunan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai ketercapaian program sebagai upaya mengatasi masalah. masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap kinerja pemerintah dalam merangkul program pembangunan.

Saran

Selanjutnya dihaapkan kepada pemerintah desa dan masyarakat dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik. dengan tujuan yang sama yaitu keberhasilan pembangunan Desa yang nantinya akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah yang telah dibahas dalam penelitian, perlu adanya tindakan yang serius bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan dengan memotivasi mengenai pentingnya pembangunan desa.

Dalam konteks ini juga diharapkan kepada masyarakat desa untuk lebih kreatif dan antusias dalam proses pembangunan di Desa karna untuk menciptakan keberhasilan pembangunan dibutuhkan peran serta atau partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. D., Siti Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Abe, Alaxander. 2012. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adisasmita R. 2013. *Pembangunan Perdesaan : Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Affuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Agustin, Merry. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang*. Jurnal Imiah, S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.
- Agustino, L. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinus, 2011. *Tingkatan Partisipasi*. <http://www.materibelajar.id/2015/12/tingkatan-partisipasi-masyarakat-dalam.html>(diakses tanggal 20 Oktober pukul 19.35).
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Samsul Munir, 2009, *Ilmu Dakwah*, Jakarta, Amzah.
- Andreeyan, Rizal. 2014. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara. 2 (4): 1938- 1951 ISSN 0000-0000.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ardianto, E. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Aswasulasikin. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar di Perigi Kecamatan Suela Lombok Timur Nusa Tenggara Barat*. Tesis Magister, tidak diterbitkan. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Chaerunisa, chika. 2014. *Jurnal Partisipasi Masyarakat dalam Program PMASIMAS di Kabupaten Brebes*. POLITIKA, Vol. 5, No.2, Oktober 2014.
- Conyers, Diana. 2010. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dunn, William. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- H.A.R Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kunarjo. 2009. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lubis, A. 2009. *Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jurnal Tabularasa, 6(2), 181-190.
- Mikkelson, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris*. Jakarta; PT Gramedia.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Ndraha, S. 2014. *Diabetes Melitus Tipe 2 dan Tatalaksana Terkini*, Medicus, Volume 27(2) : 9–16.
- Nugroho, 2015. *Mengenal Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* <https://konsultankti.wordpress.com/2015/05/18/mengenal-partisipasimasyarakat-dalam-pembangunan-sebuah-tinjauan-konsep/>(diakses tanggal 09 September pukul 20.45).
- Nurkatamso, Agus. 2013. *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta*. Skripsi S1. Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Puspaningsih, Niken Septihandini. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pedurungan*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro . Skripsi.
- Saca Firmansyah. 2009. *Partisipasi Masyarakat*. diakses 03-03-2012. <http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sulistio, Budi dan Budi, Waspa Kusuma. 2009. *Birokrasi Publik (perspektif Ilmu Administrasi Publik)*. Bandar Lampung: CV. Badranaya.
- Sumampouw, Monique. 2004. "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." *Jacob Rais, et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- Surotinojo Ibrahim. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (Sanimas) di Desa Bajo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo Gorontalo*. Tesis.Universitas DiponegoroSemarang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.